

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kepolisian adalah salah satu lembaga yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Kepolisian Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Kepolisian Daerah membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Kepolisian Daerah Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru Riau.

Ditahun 2017 ini Kepolisian Daerah Riau mendapat anugrah dimana Kepolisian Daerah Riau yang dahulunya Type-B naik tingkat menjadi Type-A. Dengan otomatis Kepala Kepolisian Daerah Riau yang dahulu dipimpin Brigadir Jenderal Polisi kini di pimpin oleh Bintang Dua yaitu Inspektur Jendra Polisi.³¹

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah



A. Sejarah Singkat Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Kondak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di kelaurnya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisarisi Polisi Tingkat I R.Moedjoko. Kepolisian Komisarisi Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru



dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bemarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bemarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bemarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel , yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening



Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap ketiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang

Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpecah-pecahnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.³²

³² <http://www.tribratanevnewsriau.com/profil>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tugas Utama Kepolisian Daerah Riau

Tugas utama dari Kepolisian Daerah Riau adalah Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selain itu Kepolisian Daerah Riau juga mempunyai pataka yang dijunjung tinggi yaitu “Tuah Sakti Hamba Negeri”

Tuah Sakti Hamba Negeri merupakan pemberian berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970. Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka tersebut yang bermakna:

- a. **Tuah**
Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Buah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seseorang yang memiliki buah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.
- b. **Sakti**
Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Biro Sumber Daya Manusia

a. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka tugas, fungsi maupun susunan organisasi dan Tata Kerja Polda Riau adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Biro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel, assesmen serta psikologi Kepolisian (Mapping Psikologi), dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.

2. Fungsi

Biro SDM berwenang menyelenggarakan fungsi Pembinaan manajemen personel, yang meliputi :

- a) Pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel;
- b) Pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel;
- d) Pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel; dan
- e) Perencanaan dan pengadministrasian bidang sdm kepolisian.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Susunan organisasi Polda Riau terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan :

Karo SDM

2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayan :

Kasubbag Perencanaan dan Administrasi (Kasubbagrenmin)

- 1) Kaur Perencanaan (Kaurren)
- 2) Kaur Administrasi (Kaurmin)
- 3) Kaur Keuangan (Kaurkeu)
- 4) Kaur Ketatausahaan (Kaurtu)

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok :

a. Kabag Pengendalian Personel (Kabag Dalpers)

- 1) Kasubbag Penyediaan Personel (Kasubbagdiapers)
- 2) Kasubbag Seleksi (Kasubbagselek)
- 3) Kasubbag Pemisahan Penyaluran (Kasubbagsahlur)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kabag Pembinaan Karier (Kabag Binkar)

- 1) Kasubbag Kepangkatan (Kasubbagpangkat)
- 2) Kasubbag Mutasi (Kasubbagmutjab)

c. Kabag Perawatan Personel (Kabag Watpers)

- 1) Kasubbag Rohani dan Jasmani (Kasubbagrohjas)
- 2) Kasubbag Moril dan Kehormatan (Kasubbagrilmat)

d. Kabag Psikologi (Kabag Psi)

- 1) Kasubbag Psikologi Kepolisian (Kasubbagpsipol)
- 2) Kasubbag Psikologi Personel (Kasubbagpers)

c. Visi Biro SDM

“Mewujudkan Personil Polri yang profesional, bermoral modern dan berkualitas yang tergelar disemua kegiatan masyarakat untuk memberikan pelayanan dengan berperilaku mahir, terpuji dan patuh hukum.”

d. Misi Biro SDM

1. menyelenggarakan rekrutmen Polri yang bersih, Transparan, akuntabel dan Humanis guna mencari calon anggota Polri yang Profesional, bermoral, modern dan berkualitas.
2. menyiapkan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan Personil Polri yang lebih tanggap dan mahir dalam pelaksanaan tugas Kepolisian yang semakin hari masyarakat semakin menuntut Polri yang profesional yang digelar keseluruh jajaran Polda Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. membangun sistem pembinaan karier Personil Polri sesuai dengan kebijakan Pimpinan Kepolisian dan menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dinamis.
 4. membangun Sumber Daya manusia Polri (SDM) secara kualitas dan kuantitas dengan prinsip the local boy for local job.
 5. mendukung pembangunan sistem kesejahteraan anggota Polda Riau sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan.
 6. membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien dan akuntabel.
 7. mengelola anggaran dan material secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung tugas operasional dan pembinaan.
- e. Tujuan Biro SDM
1. Terwujudnya SDM Polri berbasis kompetensi yang mahir, terpuji dan patuh hukum, serta integritas personel melalui berbagai penugasan serta pengalaman dibidang teknis Kepolisian.
 2. Terisnya jabatan dan promosi jabatan personel Polri berbasis kompetensi sesuai dengan kemampuan atau keahliannya melalui pelaksanaan Assesment Center dan Mapping Psikologi
 3. Terjalannya hubungan yang sinergis antara Polri dengan masyarakat melalui implementasi Perpolisian Masyarakat (polmas) dengan Membangun Sumber Daya manusia Polri (SDM) secara kualitas dan kuantitas dengan prinsip the local boy for local job.

4. terwujudnya reformasi Polri terhadap perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan pola pikir (Mind Set) dan budaya kerja (Cultur Set) Polri.
5. Terselenggaranya pengadaan sistem elektronik (LPSE) melalui Seleksi dan Werving Polri dan Sistem pengelolaan SDM Polri berbasis kompetensi yang terintegrasi secara yang transparan, akuntabel dan anti KKN.³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Data dari biro SDM Kepolisian Daerah Riau